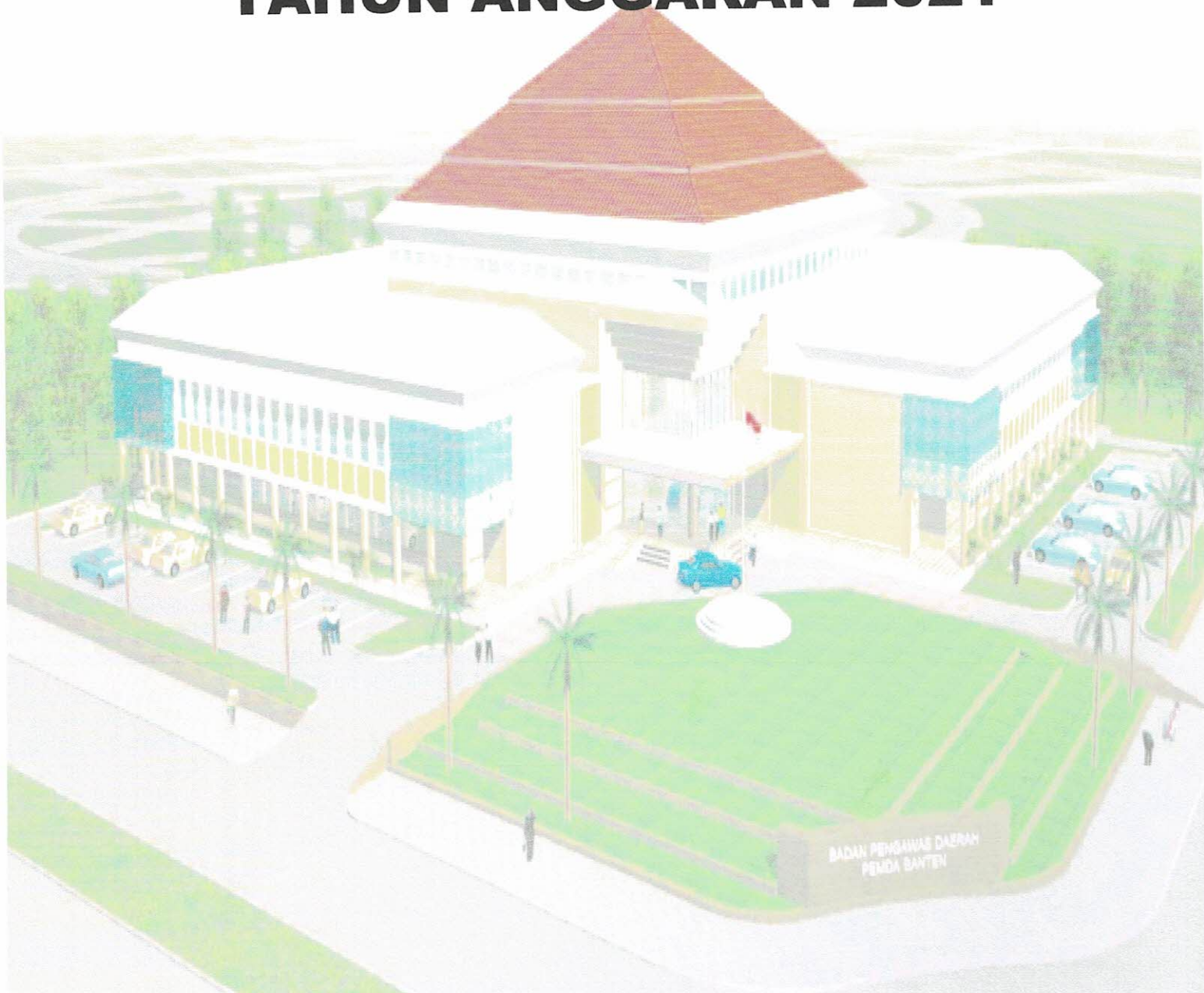




PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT

RENCANA KERJA PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2021



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN
Kawasan Pusat pemerintah Provinsi Banten (KP3B)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, bahwa kami telah dapat menyusun suatu dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 adalah suatu dokumen yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten melanjutkan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kegiatan Pengawasan secara tepat dan terarah.

Serang, Oktober 2021

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN**



Dr. H. MUHTAROM, Ak, CA.
NIP. 19630324 198402 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud Dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 .	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Sampai Dengan Triwulan III...	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat	18
2.4. Solusi Dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Inspektorat Tahun 2021	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	21
3.1 Rencana Kerja	21
3.2 Pendanaan.....	24
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat Daerah Provinsi Banten memiliki peranan dan fungsi yang cukup strategis dalam menjaga dan mengawal akuntabilitas Pemerintah Provinsi Banten. Akuntabilitas sebagai perwujudan tanggungjawab atas pengelolaan sumber daya yang ada di Pemerintah Provinsi Banten harus dikelola dan dijaga agar dapat mewujudkan *Good Governance* menuju *Clean Governance* pada Pemerintah Provinsi Banten.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 sedikit berbeda dengan Renja Murni tahun 2021 karena adanya perubahan SOTK pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang termuat dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Uraian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.

Rencana Kerja perubahan merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan serta pagu sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan tahun 2021 serta sebagai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai dan yang belum tercapai.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

- 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2016 Nomor 8);
 13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 adalah:

- a. Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten;
- b. Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Banten tahun 2021 sampai dengan triwulan II berdasarkan kebijakan, evaluasi, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran;
- c. Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- d. Memberikan pedoman kepada Inspektorat Provinsi Banten dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;

1.4. Sistematika Penulisan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Sampai Dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat
- 2.4 Solusi Dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Inspektorat Tahun 2021

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Sampai Dengan Triwulan Iii

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran(dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan;
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik;
- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 triwulan I dan II, maka terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, antara lain:

1. Terdapat perbedaan target indikator kinerja sasaran pada Renstra Inspektorat daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 dengan dokumen RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Sasaran

2.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022								
1. r d a	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD	Nilai	70	75	80	85	90
p. a t	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	2	3	3	4	4
		Capaian Level Kapabilitas APIP	Level	-	-	3	3	4
Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Banten tahun 2017-2022								
p. e n y	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD	Nilai	70	75	80	85	90
2. e l	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	3,00	3,25	3,50	4	4
		Capaian Level Kapabilitas APIP	Level	-	-	3	3	3

rasan Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD Tahun 2017-2022 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga diperlukan perubahan atas pemetaan dan pemutakhiran yang sebelumnya telah dilaksanakan. Penyesuaian tersebut telah dilaksanakan melalui perubahan kedua atas Renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Fokus perubahan pada *crosscutting*



pada indikator kinerja program dengan indikator kinerja kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak Ukur)	DPA PERUBAHAN 2021		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan III						Sisa Target Realisasi Tahun 2021	
	Target Kinerja	Pagu Anggaran 2021 renja	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.
1	2	3	4	5	6		8		10	11
		70,864,066,518		12,680,552,307		12,540,584,778		16,075,722,235		29,567,207,198
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		62,494,501,268		11,523,652,807		11,318,635,778		14,996,765,235		24,655,447,448
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		81,585,000		21,660,000		5,050,000		0		54,875,000
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	52,085,000	1 dokumen	21,660,000		3,525,000	1 dokumen	0	-	26,900,000
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	18 Laporan	6,100,000	4 laporan	-	4 laporan	1,525,000	5 laporan	0	5 laporan	4,575,000
3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	23,400,000		-				0	4 dokumen	23,400,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		55,336,902,768		9,166,763,356		10,344,524,023				21,682,270,801
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	55,005,042,768	3 bulan	9,107,350,856	5 bulan	10,283,916,523	3 bulan	14,038,752,088	3 bulan	21,575,023,301
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	288,390,000	3 bulan	59,412,500	3 bulan	53,677,500	3 bulan	95,962,500	3 bulan	79,337,500
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	43,470,000		-	4 bulan	6,930,000	4 bulan	8,630,000	4 bulan	27,910,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		674,500,000		10,725,800		96,207,400		171,132,900		396,433,900
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Kegiatan	52,000,000	-			-			1 kegiatan	52,000,000
2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan	622,500,000	1 kegiatan	10,725,800	1 kegiatan	96,207,400	1 kegiatan	171,132,900	1 kegiatan	344,433,900



*Rencana Kerja Perubahan
Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021*

Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,948,664,400		807,532,000		109,662,500		34,612,480		996,857,420
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Kegiatan	98,000,000	1 kegiatan	97,200,000		-		-	-	800,000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan	431,068,400	1 kegiatan	312,570,000		-		-	-	118,498,400
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Kegiatan	285,195,000	1 kegiatan	193,020,000		12,180,000		1,750,000	1 kegiatan	78,245,000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	274,977,000	3 bulan	7,766,000	3 bulan	59,232,500	3 bulan	3,562,480	3 bulan	204,416,020
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	859,424,000.00	3 bulan	196,976,000	3 bulan	38,250,000	3 bulan	29,300,000	3 bulan	594,898,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			537,989,000		348,470,000		164,200,000		-		25,319,000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Kegiatan	37,989,000	-	-	1 kegiatan	15,000,000		-	1 kegiatan	22,989,000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Kegiatan	500,000,000	2 kegiatan	348,470,000	1 kegiatan	149,200,000		-	-	2,330,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,463,466,000		523,347,416		471,325,052		561,856,388		906,937,144
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	654,662,400	3 bulan	100,101,247	3 bulan	96,611,636	3 bulan	92,395,027	3 bulan	365,554,490
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1,808,803,600	3 bulan	423,246,169	3 bulan	374,713,416	3 bulan	469,461,361	3 bulan	541,382,654
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,451,394,100		645,154,235		127,666,803		85,818,879		592,754,183
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	187,410,000	1 unit	17,801,651	1 unit	22,777,986	2 unit	28,834,029	2 unit	117,996,334
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Unit	384,838,000	6 unit	28,712,584	9 Unit	28,375,097	6 unit	30,754,850	2 unit	296,995,469
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146 Unit	131,770,000	-	-	36 Unit	32,320,000	37 unit	26,230,000	37 unit	73,220,000



*Rencana Kerja Perubahan
Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021*

4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Kegiatan	747,376,100	2 kegiatan	598,640,000	1 Kegiatan	44,193,720	-	-	1 Kegiatan	104,542,380
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			8,369,565,250		1,156,899,500		1,221,949,000		1,078,957,000		4,911,759,750
Penyelenggaraan Pengawasan Internal			5,780,463,250		837,358,500		1,085,069,000		884,248,000		2,973,787,750
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Kegiatan	305,300,000		-		-		-	5 Kegiatan	305,300,000
		4 Dokumen								4 Dokumen	
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Kegiatan	4,092,381,250	3 Kegiatan	737,495,000	6 Kegiatan	1,005,559,000	4 Kegiatan	816,268,000	12 Kegiatan	1,533,059,250
		98 Dokumen		18 Dokumen		25 Dokumen		20 Dokumen		35 Dokumen	
3	Reviu Laporan Kinerja	7 Kegiatan	332,400,000		-	1 kegiatan	15,580,000	1 kegiatan	15,580,000	5 Kegiatan	301,240,000
		84 Dokumen				15 Dokumen		15 Dokumen		54 Dokumen	
4	Reviu Laporan Keuangan	12 Kegiatan	570,123,000	17 Dokumen	99,000,000	10 Dokumen	55,620,000	8 Dokumen	43,950,000	61 Dokumen	371,553,000
		96 Dokumen		2 kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		8 Kegiatan	
5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 kegiatan	480,259,000		863,500	1 kegiatan	8,310,000	1 Kegiatan	8,450,000	6 Kegiatan	462,635,500
		4 Dokumen								4 Dokumen	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			873,006,000		211,541,000		66,230,000		57,450,000		537,785,000
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 Bulan	138,320,000	3 bulan	25,780,000	3 bulan	30,880,000	3 bulan	3,700,000	3 bulan	77,960,000
		2 Dokumen				1 Dokumen				1 Dokumen	
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Kegiatan	734,686,000		185,761,000		35,350,000		53,750,000	1 kegiatan	459,825,000
		40 Dokumen		13 Dokumen		3 Dokumen		5 Dokumen		19 Dokumen	



*Rencana Kerja Perubahan
Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021*

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			1,716,096,000		108,000,000		70,650,000		137,259,000		1,400,187,000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			586,375,000		-		-		-		586,375,000
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12 Kegiatan	586,375,000		-		-	6 kegiatan	-	6 kegiatan	586,375,000
		12 Dokumen						6 Dokumen		6 Dokumen	
Pendampingan dan Asistensi			1,129,721,000		108,000,000		70,650,000		137,259,000		813,812,000
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	18 kegiatan	712,695,000	5 kegiatan	108,000,000	2 kegiatan	70,650,000	2 kegiatan	67,100,000	9 Kegiatan	466,945,000
		61 Dokumen		15 Dokumen		10 Dokumen		9 Dokumen		27 Dokumen	
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 kegiatan	45,050,000		-		-	1 kegiatan	39,750,000		5,300,000
		6 Dokumen						6 Dokumen			
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 kegiatan	358,276,000		-		-	1 kegiatan	30,409,000	2 Kegiatan	327,867,000
		3 Dokumen						1 dokumen		2 Dokumen	
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 kegiatan	13,700,000		-		-		-	1 kegiatan	13,700,000
		1 Dokumen								1 Dokumen	
			70,864,066,518		12,680,552,307		12,540,584,778		16,075,722,235		29,567,207,198

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Analisis capaian kinerja Inspektorat Provinsi Banten tahun 2021 sampai dengan triwulan II :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi Rp. 19,511,287,379.00 (48,24%)
 - a. Telah terealisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yaitu pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Provinsi Banten selama 8 bulan (Januari s/d Juni, Gaji 13 dan Gaji 14)
 - b. Telah terealisasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama 6 bulan (Januari s/d Juni);
 - c. telah terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan selama 4 bulan (Januari s/d April).
2. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 26,710,000.00 (29,69%)
 - a. Telah tersusun Dokumen Perencanaan Anggaran 1 Dokumen;
 - b. Telah tersusun laporan penyerapan bulan 6 bulan (Januari s/d Juni), perjanjian kinerja murni 2021 dan Renja Murni 2021;
 - c. Telah tersusun laporan kinerja Semester 1.
3. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 106,933,200.00 (14,71%) telah terlaksananya diklat substantive 1 kegiatan sebanyak 30 orang.
4. Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didalamnya merupakan kegiatan rutin kantor serta perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp. 917,194,500.00 (69,53%) karena ada belanja perjalanan dinas yang tidak bisa diserap semua dikarenakan kondisi pandemi, sehingga mengurangi intensitas koordinasi dan konsultasi ke luar kantor.
 - a. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi selama 6 bulan (januari s/d juni);

- b. Terlaksananya Penyediaan bahan logistik kantor pada bulan februari;
 - c. Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan SPBE selama 6 bulan (pembayaran honor pelaksanaan SPBE).
- 5. Realisasi keuangan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 512,670,000.00 (36,07%)
 - a. Telah terlaksananya pengadaan gedung pos jaga, pagar dan gedung kantor;
 - b. Telah terlaksananya pengadaan Laptop 1 unit.
- 6. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat belanja penyediaan rutin kantor yang hanya terserap Rp. 994,672,468.00 (37,72%)
 - a. Tersedianya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 6 bulan (Januari s/d Juni);
 - b. Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 6 bulan (Januari s/d Juni).
- 7. Realisasi penyerapan anggaran pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 772,821,038.00 (53,25%)
 - a. Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 2 unit kendaraan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 15 unit kendaraan;
 - c. Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 36 unit;
 - d. Terpeliharanya Gedung ruangan irban 1 dan irban 2.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- 1. Realisasi kegiatan **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** sebesar Rp. 1,922,427,500.00 (25,54%). Kendala penyerapan pada kegiatan ini dikarenakan rapat masih menggunakan sistem virtual yang mengakibatkan belanja makan minum rapat tidak dapat terserap secara maksimal. Situasi pandemi

juga mengakibatkan banyak jadwal perjalanan dinas yang tidak dapat terlaksana.

- Triwulan I

- a. Terlaksananya 1 kegiatan Audit Operasional Irban I
- b. Terlaksananya 2 kegiatan Audit Operasional, Probitiy dan Monev BMD (Irban 2)
- c. Terlaksananya 1 kegiatan Audit Ketaatan, MCP dan Pendampingan BPK
- d. Terlaksananya 2 kegiatan Audit, Reviu, Probitiy dan Evaluasi SATGAS AKD
- e. Terlaksananya 1 kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan dan Kinerja (Irban IV)
- f. Terlaksananya 1 kegiatan Reviu DAK , LKPD Prov, Monev LKPD 2021 (IRBAN II)
- g. Terlaksananya 4 kegiatan Reviu & Monev IRBAN III
- h. Terlaksananya 2 kegiatan Pemantauan dan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, ITJEN, INSPEKTORAT

- Triwulan II

- a. Terlaksananya 2 kegiatan Audit Operasional, Probitiy dan Monev BMD (Irban 2);
- b. Terlaksananya 3 kegiatan Audit Ketaatan, MCP dan Pendampingan BPK;
- c. Terlaksananya 1 kegiatan Audit, Reviu, Probitiy dan Evaluasi SATGAS AKD;
- d. Terlaksananya 4 kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan dan Kinerja (Irban IV);
- e. Terlaksananya 2 kegiatan Reviu RKA 2022, RKAP 2021, LKPD (IRBAN I);
- f. Terlaksananya 1 kegiatan Reviu DAK , LKPD Prov, Monev LKPD 2021 (IRBAN II);
- g. Terlaksananya 1 kegiatan Reviu & Monev IRBAN III;
- h. Terlaksananya 1 kegiatan Monitoring & TL IRBAN II;
- i. Terlaksananya 1 kegiatan Monitoring & TL IRBAN III.

2. Pada kegiatan **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** terserap sebesar Rp. 277,771,000.00 (18,99%).

- a. Terlaksananya 1 kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan 16 Dokumen;
- b. Terlaksananya 1 dokumen Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan selama 6 bulan.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Pada kegiatan **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** yang didalamnya bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan-kebijakan teknis pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengawasan di Provinsi Banten. Realisasi keuangan pada kegiatan ini masih dalam proses verifikasi, namun untuk realisasi fisiknya sudah terlaksana sesuai target, yaitu:
 - a. Terlaksananya (Rapim Evaluasi, Saresehan, dan Pemutakhiran Data Itjen);
 - b. Tersusunnya 2 kegiatan Pergub Kebijakan Pembinaan Pengawasan dan SOP tentang Pengawasan Provinsi Banten;
 - c. Tersusunnya 1 laporan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan semester I Inspektorat.
2. Pada kegiatan **Pendampingan dan Asistensi** anggaran yang terserap sebesar Rp. 178,650,000.00 (11,99%) hal ini disebabkan karena adanya efisiensi jumlah narasumber dan ada belanja perjalanan dinas yang tidak dapat terserap maksimal karena kondisi pandemi.
 - a. Terlaksananya 2 kegiatan Monev LK, Kas Opname, Consulting dan Evaluasi SPIP (Irban I);
 - b. Terlaksananya 2 kegiatan Monev, dan Workshop PPUPD (Irban IV);
 - c. Terlaksananya 1 Kegiatan Peningkatan Kapabilitas SPIP (Irban III);
 - d. Terlaksananya 1 Kegiatan SATGAS AKD.

Tabel 2.2

Capaian Indikator Kinerja Sampai Dengan Triwulan II

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak Ukur)		Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan III		Sisa Target Kinerja
			Triwulan I	Triwulan II	
			K	K	
1		2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 dokumen		1 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	18 Laporan	4 laporan	4 laporan	10 laporan
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	3 bulan	5 bulan	6 bulan
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	3 bulan	3 bulan	6 bulan
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan		4 bulan	8 bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Kegiatan	-		1 Kegiatan
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Kegiatan	1 kegiatan		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan	1 kegiatan		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	3 bulan	3 bulan	6 bulan
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	3 bulan	3 bulan	6 bulan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak Ukur)		Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan III		Sisa Target Kinerja
			Triwulan I	Triwulan II	
			K	K	
1		2	3	4	5
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Kegiatan	3 kegiatan		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	3 bulan	3 bulan	6 bulan
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	3 bulan	3 bulan	6 bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	1 unit	1 unit	4 unit
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Unit	6 unit	9 Unit	8 unit
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146 Unit	-	36 Unit	73 unit
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Kegiatan	2 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Kegiatan			5 Kegiatan
		4 Dokumen			4 Dokumen
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Kegiatan	3 Kegiatan	6 Kegiatan	16 Kegiatan
		98 Dokumen	18 Dokumen	25 Dokumen	55 Dokumen
3	Reviu Laporan Kinerja	7 Kegiatan		1 kegiatan	6 kegiatan
		84 Dokumen		15 Dokumen	69 Dokumen
4	Reviu Laporan Keuangan	12 Kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	9 Kegiatan
		96 Dokumen	17 Dokumen	10 Dokumen	69 Dokumen
5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 kegiatan		1 kegiatan	7 Kegiatan
					4 Dokumen
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak Ukur)		Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan III		Sisa Target Kinerja
			Triwulan I	Triwulan II	
			K	K	
1		2	3	4	5
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 Bulan	3 bulan	3 bulan	6 bulan
		2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Kegiatan			
		40 Dokumen	13 Dokumen	3 Dokumen	24 Dokumen
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12 Kegiatan			6 kegiatan
		12 Dokumen			6 Dokumen
Pendampingan dan Asistensi					
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	18 kegiatan	5 kegiatan	2 kegiatan	11 kegiatan
		61 Dokumen	15 Dokumen	10 Dokumen	36 Dokumen
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 kegiatan			1 kegiatan
		6 Dokumen			6 Dokumen
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 kegiatan			3 kegiatan
		3 Dokumen			3 Dokumen
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 kegiatan			1 kegiatan
		1 Dokumen			1 Dokumen

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat

Permasalahan dan Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan pada Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten pada Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Memperbaiki ketepatan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil perbaikan

- perencanaan kinerja, sehingga memenuhi kriteria tepat dan baik, di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Perangkat Daerah;
2. Mengkomunikasikan kebijakan manajemen resiko yang ditetapkan kepada seluruh Perangkat Daerah;
 3. Membentuk perangkat pelaksanaan manajemen resiko;
 4. Mengkomunikasikan strategi dan kebijakan manajemen resiko, register resiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 5. Melakukan evaluasi atas kebijakan pengendalian resiko;
 6. Peningkatan kualitas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko;
 7. Melaksanakan penilaian resiko pemerintah daerah dan perangkat daerah dan dimutakhirkan secara berkala.

2.4. Solusi Dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Inspektorat Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian indikator kinerja baik sasaran dan program seperti yang telah diuraikan, maka diperlukan beberapa penyesuaian atas strategi dan kebijakan organisasi. Penyesuaian strategi guna mencapai kinerja pada tahun mendatang, sebagai berikut:

1. Penyesuaian aktivitas pengawasan yang dilaksanakan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan indikator kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja;
2. Penyesuaian anggaran melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama organisasi;
3. Pembinaan dan penilaian terintegrasi pada perangkat daerah untuk mendukung pencapaian sasaran berupa perbaikan pengendalian intern secara berkelanjutan.

Sedangkan dalam melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi yang telah direncanakan;

2. Mendorong penerapan Manajemen Resiko (MR) melalui pengawasan pada area-area yang beresiko tinggi dan perbaikan pengendalian intern secara berkelanjutan;
3. Komitmen dalam meningkatkan kompetensi SDM APIP agar mampu menyelenggarakan pengendalian intern secara memadai dan melakukan penilaian kualitasnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Banten, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan, maka dilakukan perubahan atas pemetaan dan pemutakhiran yang sebelumnya telah dilaksanakan yang berpedomanan pada nomenlatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Fokus perubahan pada *crosscutting* pada indikator kinerja program dengan indikator kinerja kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Penyesuaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Program / Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Indikator Sub Kegiatan	
		Renja Murni 2021	Usulan Perubahan 2021
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	18 Laporan	18 Laporan
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Kegiatan	2 Kegiatan



administrasi perangkat daerah	2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Kegiatan	3 Kegiatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	6 Unit	6 Unit
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Unit	23 Unit
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146 Unit	146 Unit
	4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Kegiatan	4 Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Kegiatan	2 Dokumen
	4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Dokumen
	5.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	12 Dokumen
Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Kegiatan	1 Kegiatan



mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Kegiatan	3 Kegiatan
Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	14 Bulan
	2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Bulan	12 Bulan
Penyelenggaraan Pengawasan				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Kegiatan	4 dokumen
Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Kegiatan	98 Dokumen
Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	3.	Reviu Laporan Kinerja	7 Kegiatan	84 Dokumen
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	4.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Kegiatan	4 Dokumen
Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5.	Reviu Laporan Keuangan	8 Kegiatan	96 Dokumen
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			
Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	1.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 Bulan	2 Dokumen
Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	2.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Kegiatan	40 Dokumen

Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			
Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		
	1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12 Kegiatan 12 Dokumen
	Pendampingan dan Asistensi		
	1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	18 Kegiatan 61 Dokumen
	2.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Kegiatan 6 Dokumen
	3.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan 3 Dokumen
	4.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Kegiatan 1 Dokumen

3.2 Pendanaan

Pendanaan pada Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan usulan anggaran Rp.62,222,696,268,- sebagai penanggungjawabnya Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang terdiri dari 7 kegiatan :
 - a) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana anggaran Rp. 81.585.000,-;
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp.55.336.902.768,-;
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 674,500,000.00,-;
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 1,676,859,400.00,-;
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 537,989,000.00,-;

- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 2,463,466,000.00,-;
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 1,451,394,100.00,-.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan usulan anggaran Rp.6,549,159,250,- sebagai penanggungjawabnya para Inspektur Pembantu (I, II, III dan IV) Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang terdiri dari 2 kegiatan :
- a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp.5,676,153,250,-
 - b) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rp. 873.006.000,-
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Rp.1,592,211,000,- sebagai penanggungjawabnya Sekretaris dan para Inspektur Pembantu (I, II, III dan IV) Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang terdiri dari 2 kegiatan :
- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Rp. 512,590,000,-
 - b) Pendampingan dan Asistensi Rp. 1,079,621,000,-

No	Rancangan Awal RKPD (Januari 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan Oktober 2021)					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Inspektorat Prov.Banten	Capaian Nilai SAKIP	85	48,492,807,500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Inspektorat Prov.Banten	Capaian Nilai SAKIP	85	62,222,696,268	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Prov.Banten			89,974,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Prov.Banten			81,585,000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Prov.Banten			40,446,660,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Prov.Banten			55,336,902,768	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Prov.Banten			727,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Prov.Banten			674,500,000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Prov.Banten			1,719,597,400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Prov.Banten			1,676,859,400	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Prov.Banten			1,421,452,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Prov.Banten			537,989,000	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Prov.Banten			2,636,730,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Prov.Banten			2,463,466,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Januari 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan Oktober 2021)					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Prov.Banten			1,451,394,100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Prov.Banten			1,451,394,100	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Capaian Nilai Maturitas SPIP	4	9,979,251,500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Capaian Nilai Maturitas SPIP	4	6,549,159,250	
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Provinsi Banten & 8 Kab/kota			8,268,100,750	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Provinsi Banten & 8 Kab/kota			5,676,153,250	
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Provinsi Banten & 8 Kab/kota			1,711,150,750	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Provinsi Banten & 8 Kab/kota			873,006,000	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Capaian Level Kapabilitas APIP	3	2,330,341,000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Capaian Level Kapabilitas APIP	3	1,592,211,000	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Provinsi Banten			225,900,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Provinsi Banten			512,590,000	
2.	Pendampingan dan Asistensi	Provinsi Banten			2,104,441,000	Pendampingan dan Asistensi	Provinsi Banten			1,079,621,000	
TOTAL					60,802,400,000	TOTAL					70,364,066,518

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 disusun dengan menjabarkan Kebijakan dan Program Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ke dalam kegiatan, dalam rangka mendukung Prioritas Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 mengacu pada 4 (empat) kebijakan antara lain :

- a. Peningkatan pengawasan kebijakan Kepala Daerah dan program- program prioritas pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemrintah Daerah;
- c. Mengedepankan pembinaan dan pencegahan daripada penindakan;
- d. Meningkatkan kapabilitas APIP

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021, selanjutnya dijabarkan dalam 2 (Dua) Program antara lain :

- a. Program Tata Kelola Pemerintahan
- b. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Berdasarkan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam 10 (Sepuluh) rencana kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan Tahun 2019 dan 2020 serta penjabaran dari isu dan permasalahan yang ada, diantaranya :

- a. Penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP) maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terhadap satuan Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten yang memiliki latar belakang pengalaman di bidang pengawasan.
- c. Kebijakan penyelenggaraan pengawasan terhadap azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat belum berjalan efektif.
- d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dibuat sering mengalami perubahan jadwal pelaksanaan.
- e. Belum adanya sinkronisasi Program Kerja Pengawasan antara BPKP dengan Inspektorat Provinsi Banten.

Serang, Oktober 2021

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN**



Dr. H. MUHTAROM, Ak, CA.
NIP. 19630324 198402 1 001